

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

inflasi tidak bisa dipisahkan dari urusan pangan rakyat. Sehingga seluruh pihak berkewajiban memikirkan dan mengurus persoalan masyarakat. Bahan komoditi seperti cabai merah, bawang merah dan putih, minyak goreng, daging ayam, dan lainnya. Yang sempat dikeluhkan masyarakat maupun para pedagang. Dalam menghadapi situasi saat ini yang masih dalam masa pandemi covid-19, hal yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi tentu harus menjadi perhatian. koordinasi harus dilakukan untuk memastikan bagaimana situasi dan kondisi stok produksi, distribusi, dan konsumsi serta dari sisi konsumen akan kebutuhan masyarakat berupa sembako tidak terganggu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan program Nasional yang bertujuan untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, dimana Kinerja TPID dari masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di tiap Provinsi di Indonesia diukur dan dinilai melalui Evaluasi Kinerja TPID, untuk meraih TPID Terbaik Tingkat Provinsi setiap tahunnya. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di daerah. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya peran dan koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil itulah perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kebijakan pembangunan perdagangan diarahkan pada terciptanya kelancaran arus barang dan jasa termasuk kebutuhan pokok masyarakat, dengan tingkat harga yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam era globalisasi pergerakan harga suatu produk akan ditentukan oleh mekanisme pasar, karena intervensi pemerintah terhadap stabilitas harga terbatas pada bagaimana mengupayakan agar barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tersedia di pasar dalam jumlah yang mencukupi dan arus distribusi lancar, sehingga tidak menimbulkan gejolak harga/keresahan masyarakat. Kabupaten Lombok Utara tidak termasuk Kabupaten yang menghitung Inflasi hanya dua Daerah yaitu Kota Bima dan Kota Mataram, tetapi berdasarkan Laporan Perkembangan harga kebutuhan pangan dan terjadi kenaikan (Inflasi) pada komodite – komodite tertentu dan Laporan Perkembangan kondisi cadangan pangan masyarakat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 • Kebutuhan Pangan pada Minggu ke IV (Empat) pada Bulan Juli Tahun 2021 a. Minyak Goreng Bimoli 1 Ltr b. Daging Ayam Broiler c. Telur Broiler isi 30 butir d. Jagung e. Cabe Merah Besar Biasa f. Tomat g. Kentang h. Wortel i. Bawang Merah j. Bawang Putih • Kebutuhan Pangan pada minggu IV (Empat) Bulan Agustus Tahun 2021 di Pasar Tanjung a. Beras Medium b. Beras Super c. Kedelai Impor d. Cabe Besar Biasa e. Kentang f. Wortel g. Buncis h. Bawang Putih i. Kacang Tanah • Kebutuhan Pangan pada minggu IV (Empat) Bulan September Tahun 2021 di Pasar Tanjung a. Beras Medium b. Beras Super c. Kedelai Lokal d. Bawang Putih

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Mencermati terjadinya kenaikan harga – harga kebutuhan pokok (Inflasi) a. Kenaikan yang terjadi di Volatile Food (Komoditas Pangan) diperkirakan akan mengalami kenaikan seiring dengan faktor musiman adanya perayaan Hari Raya Idul Adha, dan COVID-19 yang memicu tingkat konsumsi yang lebih tinggi. b. Kenaikan harga komponen diperkirakan meningkat karena didorong oleh peningkatan ekspektasi konsumen. Ekspektasi konsumen terhadap harga 2 (dua) bulan yang akan datang meningkat, yang tercermin dari laporan harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung harga kebutuhan barang tertentu mengalami kenaikan. c. Komponen administered price (harga komoditas yang diatur pemerintah) juga diperkirakan akan mengalami kenaikan secara bulanan pada periode mendatang. Permintaan yang tinggi akan transportasi untuk mendukung kegiatan arus mudik maupun arus balik selama lebaran

akan menyebabkan adanya kenaikan harga. 2. Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara - Pada tanggal 13 Juli 2021 diselenggarakan Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Gubernur, sesuai undangan dari Sekretariat Daerah Provinsi NTB

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk menjaga stabilitas harga terutama untuk komoditas volatile Food di Kabupaten Lombok Utara, TPID Kabupaten Lombok Utara telah melakukan beberapa langkah yaitu: 1. Dilakukan koordinasi serta peningkatan kerjasama dengan daerah/wilayah pengasialan komoditas pangan serta melalui pertukaran produk agar ketersediaan stok terjamin dimasing-masing daerah/wilayah 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) melakukan/pemantauan perkembangan harga pangan kepasar-pasar tradisional maupun sidak ke distributor-distributor untuk menjalin ketersediaan pasokan pangan dalam menjaga stabilitas harga. 3. Adanya kenaikan harga beberapa komoditas di pertengahan tahun yang memicu kenaikan inflasi antara lain; harga beras dan daging karena adanya indikasi pengiriman beras keluar daerah. Harga daging juga mengalami kenaikan karena banyak kebutuhan di Hari Raya Idul Adha. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian rutin melakukan pemantauan dan pengawasan harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional, dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga komoditas. □ Hasil a. Pemerintah perlu ambil langkah-langkah preventif dalam menghadapi kenaikan harga pangan ketersediaan pasokan, dan dalam situasi pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) melalui : • Pengawasan /pemantauan terhadap kenaikan harga pangan lebih intensif dilakukan, terutama pada kenaikan beras dan daging. • Peningkatan kerjasama dengan daerah/wilayah penghasil komoditi untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan dan menghimbau masyarakat agar tidak panik buying yang memicu kenaikan harga barang. • Pengawasan terhadap jalur distribusi (keluar masuk barang) antar daerah/pulau, untuk memastikan komoditas yang keluar tidak mempengaruhi kestabilan harga barang. 4. Selalu melakukan koordinasi antara tim pengendalian inflasi daerah dalam hal ini Dinas koperasi, Perindustrian dan perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Satgas Pangan (Polres Lombok Utara) dengan Hiswana Migas terkait data penyaluran gas elpiji 3 kg bersubsidi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Menjaga stabilitas harga, untuk barang utama seperti kebutuhan pokok b. Pentingnya menjaga stabilitas harga ditengah menurunnya kemampuan daya beli masyarakat akibat covid-19 c. TPID ini terus berkoordinasi untuk mencari kebijakan yang mendukung stabilitas harga d. Proaktif mendorong ekonomi yang tumbuh makin produktif e. Pemberian informasi perkembangan stok dan harga komoditas terkini f. Perlu dilakukan pertemuan rutin oleh TPID g. Perbaiki distribusi dengan memperpendek mata rantai pasokan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kegiatan TPID ini diharuskan lebih banyak melakukan operasi pasar/pasar murah sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok bisa ditekan. 2. Penguatan produksi pangan terus diperkuat melalui penggunaan bibit unggul, penataan kalender tanam, hingga pemanfaatan teknologi pertanian terkini 3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara sinergis oleh TPID.